

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

a. Dengan memperhatikan kondisi potensi maritim melalui program kegiatan di wilayah Kalimantan Barat maka Lantamal XII/ Pontianak:

1. Mengoptimalkan program kegiatan Kampung Bahari Nusantara (KBN) terutama pada kluster pertahanan (dari 5 kluster yang ada) di daerah-daerah pesisir dan perbatasan yang merupakan upaya pembinaan terhadap desa-desa binaan Lantamal XII/ Pontianak dalam menanamkan kesadaran bela negara atas hak dan kewajiban sebagai warga negara, untuk kepentingan pertahanan negara di laut dan dalam perspektif kepentingan masyarakat, dengan tujuan utama untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim khususnya wilayah pesisir.

2. Mengoptimalkan Kegiatan Bhakti TNI AL secara terintegrasi dan berkesinambungan melalui kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa dan penyuluhan di daerah pesisir wilayah kerja Lantamal XII/ Pontianak. Sebagai wujud kepedulian dan peran serta Lantamal XII/ Pontianak dalam melaksanakan fungsi Pembinaan Potensi Maritim yang meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarana daerah serta dinamisasi pembangunan kelautan di wilayah Kalimantan Barat, sehingga dapat memanfaatkan kedekatan personel Lantamal XII/ Pontianak dengan masyarakat pesisir dengan

dibantu koordinasi yang baik dengan Pemda setempat dan instansi militer lainnya secara rutin dan lebih intens serta dukungan Mabesal baik secara regulasi dan kebijakan. Dengan objek sasaran yang telah ditentukan dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah dengan bertujuan untuk mempercepat pembangunan sarana umum yang dibutuhkan masyarakat dan yang terpenting adalah adanya kebersamaan TNI, Instansi lainnya dan Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Mengoptimalkan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) sebagai salah satu perwujudan dari tugas TNI AL dalam upaya membantu pemerintah di daerah guna meningkatkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara guna memupuk jiwa nasionalisme terhadap NKRI dan membentuk RAK Juang dalam rangka menjaga Kedaulatan Negara. Kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan terpadu lintas sektoral antara TNI AL dengan instansi pemerintah. Adapun sasarannya meliputi upaya meningkatkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara serta menitikberatkan pada daerah pesisir dan perbatasan Kalbar, sehingga diharapkan hasilnya menjalin hubungan dengan masyarakat dan benar-benar dapat menyentuh kepentingan masyarakat yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat sekitar Mako Lantamal XII/ Pontianak.

4. Bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat menyelenggarakan kegiatan Karya Bakti Penanaman Mangrove guna mempertahankan dan menjaga

ekosistem dari abrasi, di sepanjang pesisir Kalbar dalam rangka menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) untuk kepentingan Pertahanan Negara (Hanneg) dan sebagai implementasi dari darma bakti TNI serta untuk memperkuat kemandirian TNI dengan Rakyat. Kegiatan penanaman mangrove ini dapat dilaksanakan baik secara sendiri maupun secara bersama dengan ekosistem padang lamun dan terumbu karang yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas suatu ekosistem pesisir, baik secara fisik maupun secara ekologis. Sehingga dapat menjaga batas wilayah negara yang disebabkan berkurangnya garis pantai.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan pemberdayaan potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat:

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang bervisi Maritim dan mendukung Pengelolaan potensi maritim pada daerah/wilayah Pertahanan Maritim.
2. Pemahaman masyarakat di wilayah pesisir tentang kemaritiman terkait dengan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat maupun pengamanan negara masih rendah.
3. Peran pertahanan dalam hal ini Lantamal XII/ Pontianak belum sepenuhnya mampu mengendalikan wilayah laut nasional Indonesia disebabkan masih terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang mendalami dan tertarik kepada bidang kemaritiman.
4. Tidak semua pemimpin/penguasa yang peduli terhadap masalah- masalah kemaritiman.

5. Lemahnya dukungan SDM dan tingkat kepedulian pemimpin di daerah terhadap permasalahan kemaritiman ini tercermin dari ketidakpedulian para pemangku kepentingan stakeholder terhadap bidang maritim.
 6. Sarana dan prasarana yang belum maksimal mendukung program kegiatan TNI AL serta pendekatan pembina potensi maritim terhadap masyarakat peisisir masih kurang.
 7. Kondisi kualitas Sumber Daya Manusia (dari segi pendidikan dan kesejahteraan) yang ada di sepanjang pesisir Kalimantan saat ini masih harus ditingkatkan tentunya dengan sentuhan pemerintah pusat maupun daerah untuk memajukan wilayahnya, terutama di dekat perbatasan bagian utara Kalimantan Barat.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelenggaraan pemberdayaan potensi maritim di Kalimantan Barat guna memperkuat Sistem Pertahanan Rakyat Semesta meliputi:
1. Melakukan pengawasan, pengamanan, pengendalian serta memonitor semua kegiatan kemaritiman di wilayah Kalimantan Barat.
 2. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pembangunan kelautan utamanya untuk pengamanan dan pemberdayaan pulau-pulau terkecil terluar/wilayah perbatasan serta pengamanan batas-batas perairan di wilayah laut yuridiksi nasional terkait tentang Dawilhanla dan ikut berperan membantu Pemda dalam upaya meningkatkan Industri Perikanan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Malaksanakan pengumpulan dan pemutakhiran data potensi maritim serta pendayagunaan dan pemberdayaan sumber daya maritim kepada masyarakat desa, dan *stakeholder* guna membentuk SDM aspek maritim yang berpotensi sebagai komponen cadangan maupun pendukung guna memperkuat dan sebagai unsur dukungan kepada TNI Angkatan Laut.
4. Melaksanakan kegiatan operasi bintahwil melalui kegiatan sosialisasi aspek-aspek kemaritiman, pendidikan pendahuluan bela negara, empat pilar kebangsaan kepada organisasi pemuda, sekolah-sekolah dan masyarakat maritim lainnya guna menanamkan jiwa nasionalisme serta meningkatkan jiwa dan semangat bahari melalui pendampingan kegiatan olah raga perairan, Pramuka Saka Bahari, Pelestarian lingkungan hidup, dan kunjungan ke KRI.
5. Pelaksanaan peningkatan potensi laut secara terpadu melibatkan dua atau lebih kegiatan terpadu untuk ekosistem, sumber daya dan pemanfaatan (pembangunan) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan perbatasan. Dalam hal ini, integrasi terdiri dari tiga dimensi yaitu sektoral, bidang pengetahuan dan tautan ekologis.
6. Peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Diharapkan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada, maka kegiatan pembinaan potensi maritim di wilayah kerja Lantamal XII/ Pontianak dapat terlaksana dengan baik.
7. Melakukan koordinasi dan kerja sama kepada Pemda setempat, agar sarana dan prasarana yang dimiliki Pemda

juga dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi maritim.

5.2 Saran

Dengan memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah Kalimantan Barat maka masyarakat pesisir dan perbatasan perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat didukung oleh TNI AL dalam hal ini Lantamal XII sebagai koordinator dalam mengerahkan kekuatan pendukung dalam bentuk program-program kegiatan yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus menumbuhkan jiwa patriot, bela negara dan rasa cinta tanah air.

Dari kesimpulan di atas maka untuk meningkatkan peran Lantamal XII sebagai koordinator pembinaan potensi maritim serta untuk mempercepat dan menumbuh kembangkan semangat membangun daerahnya maka diperlukan rekomendasi sebagai berikut:

a. Saran Teoritis

1. Peneliti menyarankan agar pada hasil penelitian ini, untuk selanjutnya dapat dilakukan kajian secara mendalam tentang faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Kalimantan Barat dalam memberdayakan potensi maritim dengan memanfaatkan segala sumber daya nasional di wilayahnya untuk mewujudkan pertahanan maritim yang tangguh guna memperkuat pertahanan semesta.
2. Peneliti memberikan saran atas adanya keterkaitan antara pemberdayaan potensi maritim dengan sistem pertahanan rakyat semesta khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan perbatasan. Sinergi dan konsistensi kebijakan yang ditempuh Pemerintah daerah

setempat dengan didukung oleh Lantamal XII/ Pontianak sebagai Komando Kewilayahan aspek laut untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dalam mendukung pertahanan wilayah harus dioptimalkan, sehingga mampu membawa pembangunan Kalimantan Barat keluar dari berbagai tekanan eksternal. Untuk itu perlu adanya kajian tentang keterkaitan tersebut agar potensi maritim yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal.

b. Saran Praktis

1. Lantamal XII/ Pontianak bersama Pemerintah daerah dan jajaran lain bekerjasama secara terpadu untuk meningkatkan frekuensi kegiatan program pembinaan potensi maritim berupa membangun Kampung Bahari Nusantara (KBN), kegiatan karya bhakti TNI AL, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Pembinaan Komunikasi Sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di setiap wilayah pesisir berdasarkan pendataan kondisi sosial di lapangan secara skala prioritas sesuai kebutuhan mendasar masyarakat.

2. Lantamal XII/ Pontianak agar mengajukan pengembangan jajaran di bawahnya dalam membina potensi maritim di pelosok-pelosok daerah yang sulit dijangkau.

3. Lantamal XII/ Pontianak agar mengajukan penambahan personil Babinpotmar yang sudah dibekali pengetahuan tentang kemaritiman, sehingga dapat dengan mudah berhubungan langsung terjun ke masyarakat.

4. Lantamal XII/ Pontianak agar mengajukan kepada komando atas secara berjenjang melalui pengajuan RKA KL

untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Diharapkan dengan lengkapnya sarana dan prasarana di wilayah kerja Lantamal XII/ Pontianak maka kegiatan pembinaan potensi maritim dapat terlaksana dengan baik.

5. Lantamal XII/ Pontianak agar selalu melakukan koordinasi dan kerja sama kepada Pemerintah daerah setempat dan instansi samping, agar sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah daerah dan instansi samping berupa sarana pelabuhan, fasilitas umum, dan gedung-gedung serba guna dan lain-lain dalam mendukung potensi maritim dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi maritim.

